

RINGKASAN

**FITRI KHODIJAH NASUTION
200510309**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA
ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG
KULIAH TERPADU KAMPUS II
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN
2018 (Studi Putusan : No. 54/Pid.Sus –
TPK/2021/PN.Mdn)
(Dr. BUDI BAHREISY, S.H., M.H dan
NURIBADAH, S.H., M.H)**

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum dalam bentuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan demikian dibutuhkan kepekaan Hakim dalam menganalisis, mempertimbangkan dan memutus perkara, sebagaimana dalam putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan merugikan keuangan negara.

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia dan menganalisis putusan Hakim terhadap tindak pidana korupsi dana anggaran pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun anggaran 2018 pada putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn.

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran (deskripsi). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur/dokumen (*library research*).

Hasil penelitian ini mengenai pengaturan tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia, sudah tepat dan kuat, jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan dalam analisis putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, seharusnya Majelis Hakim juga menerapkan hukuman yang ada pada Pasal 52 KUHP yang hukumannya ditambah 1/3 (sepertiga) dari vonis Majelis Hakim supaya memberikan efek jera, karena terdakwa sudah melanggar suatu kewajiban khusus atau kewenangan dari jabatannya yang sudah diberikan dan akibat dari perbuatan terdakwa yang merugikan keuangan negara.

Saran dari peneliti untuk menyikapi pelaku tindak pidana korupsi, diharapkan dengan langkah-langkah yang efektif dan bertanggungjawab, seperti penerapan hukuman yang tegas, penguatan lembaga pengawas, dan peningkatan kesadaran akan bahaya korupsi di semua tingkatan masyarakat.

Kata Kunci : Pidana Korupsi, Undang-Undang Korupsi, Analisis Hakim

SUMMARY

**FITRI KHODIJAH NASUTION
200510309**

***ANALYSIS OF THE JUDGE'S RULING
REGARDING CRIMINAL ACTS OF
CORRUPTION FUNDS FOR THE
CONSTRUCTION OF INTEGRATED
COLLEGE BUILDINGS, CAMPUS II OF
NORTH SUMATRA STATE ISLAMIC
UNIVERSITY FOR THE 2018 BUDGET
YEAR (Decision Study: No. 54/Pid.Sus-
TPK/2021/PN.Mdn)***

**(Dr. BUDI BAHREISY, S.H., M.H and
NURIBADAH, S.H., M.H)**

The criminal act of corruption is an act that is against the law in the form of enriching oneself or others which is detrimental to state finances and the state economy. Thus, the judge's sensitivity is needed in analyzing, considering and deciding cases, as in decision Number 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn the defendant committed a criminal act of corruption jointly and harmed state finances.

The purpose of this research is to find out and explain how criminal acts of corruption are regulated in Indonesian law and to analyze the judge's decision regarding criminal acts of corruption in the budget for the construction of an integrated lecture building, campus II, State Islamic University of North Sumatra for the 2018 fiscal year in decision Number 54/Pid. Sus-TPK/2021/PN.Mdn.

This research method uses a normative juridical method, using a statutory approach and a case approach. Data analysis uses qualitative analysis, namely data analysis that does not use numbers, but rather provides an overview (description). Data collection techniques were carried out using literature/document studies (library research).

The results of this research regarding the regulation of criminal acts of corruption in Indonesian legislation, it is precise and strong, are correct if seen in Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, while in the analysis of decision Number 54/Pid .Sus-TPK/2021/PN.Mdn, the Panel of Judges should also apply the punishment in Article 52 of the Criminal Code where the penalty is increased by 1/3 (one third) of the Panel of Judges' verdict in order to provide a deterrent effect, because the defendant has violated a special obligation or authority from the position he was given and the consequences of the defendant's actions which were detrimental to state finances.

Suggestions from researchers for responding to perpetrators of criminal acts of corruption are expected to take effective and responsible steps, such as implementing strict penalties, strengthening supervisory institutions, and increasing awareness of the dangers of corruption at all levels of society.

Keywords: Criminal Corupption, Corupption Laws, Judge's Analysis